



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
BANYUWANGI
2025

KATA PENGANTAR



“Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi BPPP Banyuwangi Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).”

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2024 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP Banyuwangi menuju terwujudnya good governance dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi dan di sisi lain. Laporan Kinerja merupakan alat kendali, pemacu, dan umpan balik peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BPPP Banyuwangi.

Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara umum dan khususnya BPPP Banyuwangi bantuan perangkat lunak berbasis Logical Framework dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. *Performance* BPPP Banyuwangi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator

keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis BPPP Banyuwangi Tahun 2025 sebagai kontrak kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025 yang mana IKU BPPP Banyuwangi merupakan hasil cascading dari IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan, IKU Level I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan (BPPSDMKP) dan IKU Level II Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai pada bidang pelatihan dan penyuluhan masyarakat KP serta dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya. BPPP Banyuwangi melalui hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan BPPP Banyuwangi serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam kurun waktu Triwulan III Tahun 2025. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, Namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh BPPP Banyuwangi.

Dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi kepada yang berkepentingan.

Banyuwangi, 17 Oktober 2025
Kepala BPPP Banyuwangi,



Moch. Muchlisin

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
RINGKASAN.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	2
1.4 Keragaan SDM	4
1.5 Sistematika Laporan Kinerja.....	4
1.6 Potensi dan Permasalahan	6
2. PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis.....	9
2.1.1 Visi.....	9
2.1.2 Misi.....	10
2.1.3 Tujuan.....	11
2.1.4 Sasaran Program	11
2.2 Rencana Kerja Tahunan.....	13
2.3 Penetapan Kinerja (PK) BPPP Banyuwangi	14
2.4 Pengukuran Kinerja.....	18
2.4.1 Rumus Pengukuran	18
2.4.2 Metode Pengukuran Kinerja	18
BAB III. AKUNTABILITAS	20
3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama.....	20
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	20
3.3 Pengarus Utamaan Gender (PUG)	56
3.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025	58
3.5 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPP Banyuwangi	59
BAB IV. PENUTUP	61
4.1 Capaian Kinerja Utama.....	61
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keragaan SDM BPPP Banyuwangi Per 30 September Tahun 2025.....	4
Tabel 2. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025	14
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Bulan Januari 2025 (Bidang Pelatihan).....	14
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Revisi Bulan Agustus 2025 (Bidang Pelatihan).....	15
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Bulan Januari (Bidang Penyuluhan)	16
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2025	21
Tabel 8. Capaian indikator Kinerja 3 Triwulan III Tahun 2025.....	25
Tabel 9. Perbandingan realisasi Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih dengan UPT Lingkup BPPSDMKP	26
Tabel 10. Capaian indikator Kinerja 4 Triwulan III Tahun 2025	27
Tabel 11. Perbandingan realisasi Nilai PNBK Triwulan III Tahun 2025 dengan UPT Lingkup BPPSDMKP	28
Tabel 12. Capaian indikator kinerja 9 Tahun 2025	32
Tabel 13. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal dengan UPT Lingkup BPPSDM KP	33
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja 11 Tahun 2025	35
Tabel 15. Perbandingan realisasi Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP	37
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja 14 Tahun 2025	40
Tabel 17. Perbandingan realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP	41
Tabel 18. Indikator kinerja Utama 16 Triwulan III Tahun 2025.....	44
Tabel 19. Perbandingan realisasi kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh dengan UPT Lingkup BPPSDMKP	45
Tabel 20. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang ditingkatkan Kelasnya di Satker BPPP Banyuwangi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP	48
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja 18 Tahun 2025	49
Tabel 22. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk dengan UPT Lingkup BPPSDM KP	50
Tabel 23. Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi	53
Tabel 24. Perbandingan realisasi Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP	54

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPP Banyuwangi Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 26. Realisasi Anggaran per kegiatan	59
Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan III Tahun 2025 .	61



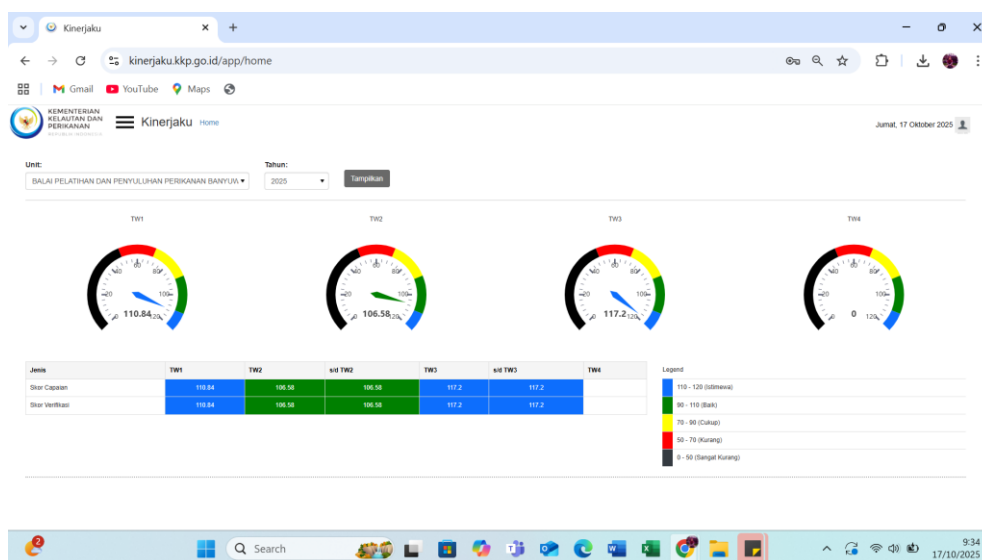
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi BPPP Banyuwangi Tahun 2025	3
Gambar 2. Capaian Kinerja IKU + IKM	18
Gambar 3. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 BPPP Banyuwangi	20

RINGKASAN

Pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat perubahan pada indikator kinerja pelatihan sehingga saat ini memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 6 Sasaran Strategis dan 21 Indikator Kinerja Utama dengan 8 IK berstatus biru dan 1 IK berstatus hijau. Pada triwulan ini ada penambahan 1 IKU pada sasaran **I. Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan** yaitu Laporan Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (*Smart Fisheries Village / SFV*) BP3 Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (laporan)

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Logical Framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Banyuwangi pada triwulan ini **sebesar 117,20%**.



Gambar 1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis TW III

Capaian Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan III Tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Capaian Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan III Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
I. Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan					
1	Laporan Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village / SFV) BP3 Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (laporan)	1	-	-	-
2	Jumlah Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Banyuwangi (Orang)	3,763	-	-	-
3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)	5,353	1.000	1.710	120
4	Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,78	0,12	0,19	120
5	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	120	-	-	-
II. Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan					
6	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)	1	-	-	-
7	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)	1	-	-	-
III. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	71,5	-	-	-
9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100	75	87,27	116,36
10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83	-	-	-

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
11	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	85	85	85	100
12	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	80	-	-	-
13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)	80	-	-	-
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	80	80	100	120
15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPP Banyuwangi (Nilai)	92	-	-	-
IV. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
16	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi	5.996	4.000	5.000	120
17	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi	216	130	200	120
18	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	791	267	350	120
19	Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)	44	22	40	120
V. Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan					
20	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di Satker BPPP Banyuwangi (Paket)	1	-	-	-
VI. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
21	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus	15	-	-	-

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi				



IKU dibawah Pusat Pelatihan KP



IKU dibawah Pusat Penyuluhan KP

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN, Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2025 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi pada Triwulan III Tahun 2025 ini melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah sesuai yang tertuang pada RENSTRA BPPP Banyuwangi



Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai BPPP Banyuwangi serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPPP Banyuwangi guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil BPPP Banyuwangi triwulan III Tahun 2025, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) BPPP Banyuwangi.

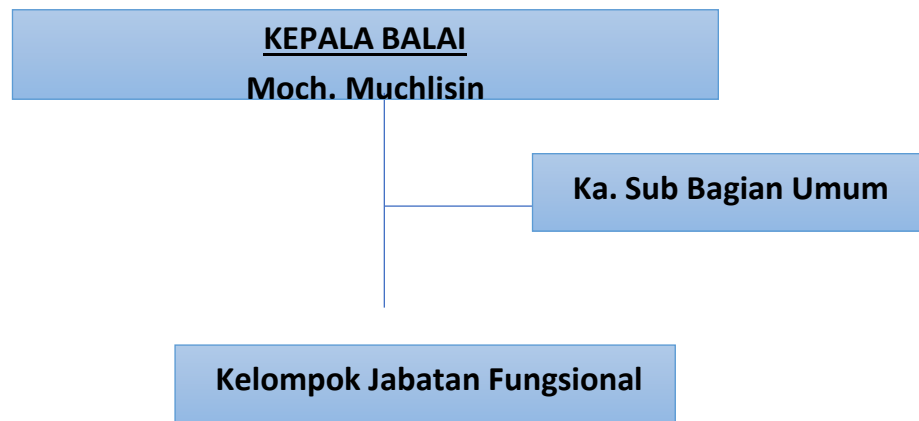
1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Triwulan III BPPP Banyuwangi Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025 ini bertujuan untuk:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Tahun 2025.
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPPP Banyuwangi Tahun 2025 untuk meningkatkan kinerjanya sebagai umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER- 87/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi dipimpin oleh kepala balai yang merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator dengan struktur organisasi terdiri atas Sub bagian umum dan kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi BPPP Banyuwangi dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi BPPP Banyuwangi Tahun 2025

Dalam pelaksanaan tugas BPPP Banyuwangi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, sertapelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan perikanan
- b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan
- c. Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan
- d. Penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan
- e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan
- f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan
- g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utamadan pelaku usaha
- h. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sedangkan tugas dari setiap organisasi di BPPP Banyuwangi yaitu :

1. Subbagian Umum melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.4 Keragaan SDM

Dalam mendukung kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025, jumlah SDM yang memadai sangat diperlukan khususnya untuk pengelolaan dalam fungsi pelatihan dan penyuluhan. Perkembangan jumlah SDM Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, berikut data jumlah pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

Tabel 1. Keragaan SDM BPPP Banyuwangi Per 30 September Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Balai	1
2.	Kepala Sub Bagian Umum	1
3.	Instruktur	15
4.	Widyaiswara	1
5.	Fungsional Tertentu	11
6.	Fungsional Umum	34
7.	Penyuluh Perikanan PNS	382
8.	Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)	184
9.	PPPK	124
10.	Tenaga Kontrak	18
Total		771

Sumber: Kepegawaian BPPP Banyuwangi, 2025

Jumlah pegawai BPPP Banyuwangi berdasarkan jenis kelamin sebanyak 309 orang perempuan (40%) dan 462 pegawai berjenis kelamin laki-laki (60%). Komposisi pegawai BPPP Banyuwangi menunjukkan bahwa proporsi pegawai laki-laki (60%) lebih tinggi dibandingkan perempuan (40%). Kesenjangan ini mencerminkan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang kelautan dan perikanan, khususnya di lembaga pelatihan teknis, masih relatif rendah dibandingkan laki-laki

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Dasar haluan yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja BPPP

Banyuwangi pada Tahun 2025 adalah :

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. PP No 08 Tahun 2016 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 53 tahun 2024 tentang Pengelolaam Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPP Banyuwangi merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi Tahun 2025 serta pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 di Tahun 2025. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

**LKJ BPPP
Banyuwangi
mengacu pada
Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014**

- **Ringkasan Eksekutif**, menyajikan uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2024
- **Bab I Pendahuluan**, menyajikan hal-hal umum tentang BPPP Banyuwangi seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BPPP Banyuwangi pada Tahun 2024
- **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan uraian singkat tentang Rencana Strategis BPPP Banyuwangi 2019-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2024 serta Pengukuran Kinerja.
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya
- **Bab IV Penutup**, menyajikan uraian singkat terkait kesimpulan, pemasalahan dan rekomendasi.
- **Lampiran**, menyajikan pendukung laporan seperti Perjanjian Kinerja, Surat tugas penyusunan laporan kinerja dan realisasi anggaran per IKU

1.6 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Keberadaan SDM KP yang kompeten memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi bertugas melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan pada wilayah kerja di untuk pelatihan berada pada 6 provinsi yaitu Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sedangkan untuk wilayah kerja penyuluhan ada pada 4 propinsi yaitu Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Kegiatan pelatihan ditujukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha di bidang budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kegiatan penyuluhan bertugas menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan dan pelaksanaan penyuluhan serta penyusunan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swsdaya dan swasta.

Keberhasilan pencapaian karena adanya potensi sumberdaya BPPP Banyuwangi yaitu :

1. Memiliki SDM yang berpengalaman di bidangnya
2. Memiliki sarpas diklat yang memadai dan representatif
3. Penyelenggarakan diklat bidang kelautan
4. Memiliki lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (LSP) I KP yang telah dilisensi oleh BNSP dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSP Kelautan dan Perikanan
5. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu (ISO 9001 : 2015)
6. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf untuk mencapai tujuan

organisasi yaitu dengan adanya dukungan kebijakan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia KP untuk mengembangkan mutu diklat

b. Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain:

❖ Aspek penyelenggaraan pelatihan KP antara lain:

1. Ketersediaan tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa sudah memasuki usia purnatugas;
2. Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
3. Kurikulum dan modul belum seluruhnya tersedia dan terstandar;
4. Kompetensi SDM BPPP Banyuwangi perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan;
5. Sebaran dan jangkauan pelatihan belum merata sesuai dengan sasaran pelatihan, khususnya pelatihan yang dipersiapkan mendukung program prioritas KKP seperti di Wilayah Perbatasan, SKPT dan lainnya

❖ Aspek ketenagaan penyuluh perikanan

Ketenagaan penyuluh perikanan dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan, juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup krusial diantaranya:

- a. Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal
- b. Jumlah penyuluh perikanan yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku utama yang akan disuluh
- c. Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan lapangan
- d. Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota potensi perikanan

- 
- e. Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya
 - f. Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan (diklat fungsional dan teknis) yang masih kurang.
 - g. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia
 - h. Kualitas dan kuantitas (jumlah dan penyebaran) penyuluh perikanan masih belum memadai
 - i. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh
 - j. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas

2. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berkontribusi terhadap terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) berkontribusi pada visi tersebut melalui pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

2.1.1 Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Visi BPPSDMKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi BPPP Banyuwangi pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP

dan visi BPPSDMKP dan Puslatluh yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan untuk tercapainya peningkatan SDM KP kompeten untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

2.1.2 Misi

Misi BPPP Banyuwangi adalah menjalankan misi Presiden, KKP dan BPPSDM, Puslatluh dalam bidang kelautan dan perikanan. Misi Presiden Prabowo yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Berdasarkan 8 misi presiden tersebut, BPPP Banyuwangi mendukung misi ke 3, 4, dan 6. Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat,

memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

2.1.3 Tujuan

Tujuan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang juga berdasarkan tujuan Puslatluh. Untuk itu tujuan BPPP Banyuwangi adalah menghasilkan SDMKP mandiri dan kompeten yang dapat mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri serta mampu menjadi wirausaha dengan meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan secara optimal serta sadar dan peduli terhadap keberlanjutan sumberdaya KP, dengan indikator tujuan adalah:

1. Tersedianya lembaga pelatihan dan penyuluhan KP sesuai dengan standar
2. Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sesuai standard
3. Tersedianya tenaga pelatihan dan kepelatihan yang profesional
4. Peserta latih yang kompeten
5. Jumlah kelompok pelaku utama yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya
6. Penyuluh perikanan yang kompeten dan berdaya saing.

2.1.4 Sasaran Program

Sasaran strategis program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun kedalam 6 (enam) Sasaran Strategis yakni:

1. Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan
2. Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
4. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
5. Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model

Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

6. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

BPPP Banyuwangi memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 21 Indikator Kinerja Utama program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan beserta target yang akan dicapai di triwulan III tahun 2025.

Sasaran strategis pertama (SK.01) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan", dengan Indikator Kinerja :

1. Laporan Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (*Smart Fisheries Village / SFV*) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (laporan)
2. Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Banyuwangi (orang)
3. Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih BPPP Banyuwangi (orang)
4. Nilai PNBPN Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Milyar)
5. Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)

Sasaran strategis kedua (SK.02) yang akan dicapai adalah tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja:

1. Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)
2. Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)

Sasaran Strategi ketiga (SK.03) yang akan dicapai adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja berikut :

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)
2. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)
3. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)
4. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk

- perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)
5. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)
 6. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)
 7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)
 8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPP Banyuwangi (Nilai)

Sasaran strategis keempat (SK.04) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja :

1. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi (kelompok)
2. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)
3. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)
4. Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)

Sasaran strategis kelima (SK.05) yang akan dicapai adalah Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja utama yaitu Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Banyuwangi (Paket).

Sasaran Strategis keenam (SK.06) Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi.

2.2 Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025 menetapkan program yaitu kegiatan pelatihan dan Penyuluhan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 104.785.524.000 dengan rincian kegiatan, yaitu :

Tabel 2. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautandan perikanan	5.837.734.000
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Banyuwangi	90.650.340.000
Total Anggaran BPPP Banyuwangi		96.488.074.000

Sumber: DIPA Revisi ke-6 BPPP Banyuwangi Tahun 2025

2.3 Penetapan Kinerja (PK) BPPP Banyuwangi

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BPPSDM KP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan Sasaran Strategis BPPP Banyuwangi dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPPP Banyuwangi dengan Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (PuslatKP) dan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (PusluhKP).

Perjanjian Kinerja BPPP Banyuwangi dilakukan dengan (PuslatKP) dan (PusluhKP). Sejak bulan Januari sampai dengan akhir triwulan III Tahun 2025, telah terjadi dua kali perubahan yaitu pada bulan April dan Agustus 2025 dengan PuslatKP, sedangkan Perjanjian Kinerja dengan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah terjadi satu kali perubahan yaitu pada bulan April. Adapun rincian Perjanjian Kinerja BPPP Banyuwangi secara berurutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Bulan Januari 2025 (Bidang Pelatihan)

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Banyuwangi (orang)	3.763
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang)	5.353
		3	Nilai PNBPP BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,78
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	120
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan	5	Sarana pelatihan KP ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (unit)	1

	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Prasarana pelatihan KP ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (unit)	1
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	85
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	80
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)	80
		12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	80
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	92
		14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi	71,5

Pada Bulan Agustus 2025 terjadi perubahan karena terjadi penetapan IKU baru yaitu Laporan Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP pada sasaran kegiatan Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan. Rincian perubahan PK tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Revisi Bulan Agustus 2025 (Bidang Pelatihan)

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Banyuwangi (orang)	3.763
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang)	5.353
		3	Nilai PNBP BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,78
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	120
		5	Laporan Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (laporan)	1
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Sarana pelatihan KP ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (unit)	1
		7	Prasarana pelatihan KP ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (unit)	1

3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100
		9	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83
		10	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	85
		11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	80
		12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)	80
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	80
		14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	92
		15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi	71,5

Perjanjian Kinerja Bidang Penyuluhan antara Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan dengan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan bulan Januari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Bulan Januari (Bidang Penyuluhan)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Disuluh Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	5.996
		2	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Ditingkatkan Kelasnya di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	216
		3	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Dibentuk di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	791
		4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	44

2	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi	15
---	--	---	---	----

Pada bulan Agustus terjadi perubahan penetapan perjanjian Kinerja bidang penyuluhan dengan PusluhKP yaitu penambahan sasaran kegiatan Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan Indikator Kinerja berupa Media Penyuluhan sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Banyuwangi (paket). Rincian perubahan PK bidang penyuluhan bulan Agustus 2025 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Revisi Agustus (Bidang Penyuluhan)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Disuluh Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	5.996
		2	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Ditingkatkan Kelasnya di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	216
		3	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Dibentuk di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	791
		4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)	44
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	5	Media Penyuluhan sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Banyuwangi (paket)	1
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi	15

2.4 Pengukuran Kinerja

2.4.1 Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen. Perhitungan Indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- Angka maksimum atau istimewa adalah 120;
- Angka minimum atau belum ada penilaian adalah 0;
- Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- Status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 – 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 2. Capaian Kinerja IKU + IKM

2.4.2 Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BPPP Banyuwangi dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (Triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja lingkup BPPP Banyuwangi yang ditetapkan melalui SK Kepala BPPP Banyuwangi Tahun 2025 Nomor: B.228/BPPP.BYW/TU.140/I/2025 tanggal 02 Januari 2025



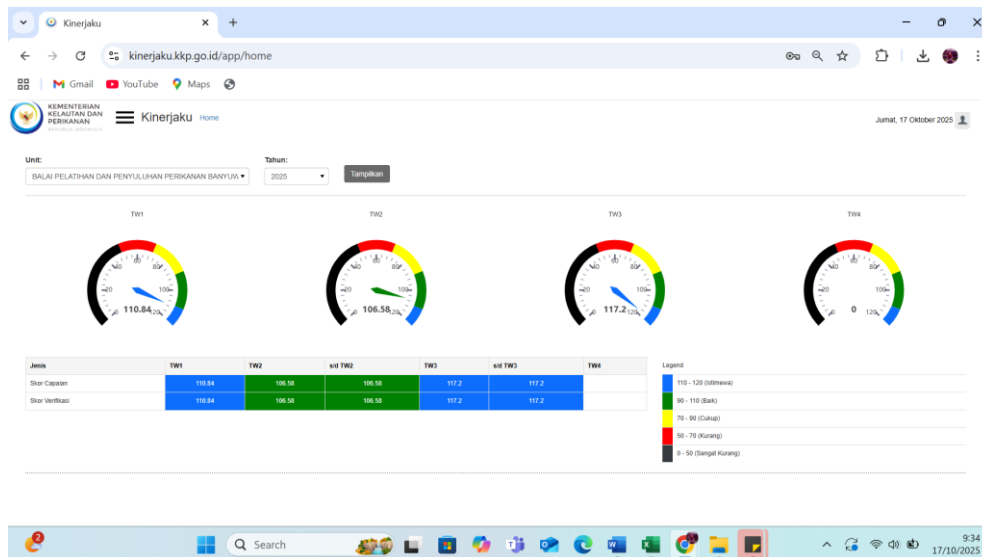
tentang Penunjukan Tim Pengelola Kinerja dan SAKIP TA. 2025. Pada pelaksanaannya, capaian kinerja Triwulanan dipantau oleh Tim Teknis Kelola Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada kepala Balai. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Kelompok Kerja Program dan Monev merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III. AKUNTABILITAS

3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan III Tahun 2025 di tingkat korporat sebesar 117,20% sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 3. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 BPPP Banyuwangi
Sumber: web kinerjaku.kkp.go.id

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi BPPP Banyuwangi Tahun 2025. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BPPP Banyuwangi yang menjadi kontrak kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 dapat tercapai.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
I. Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan					
1	Laporan Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village / SFV) BP3 Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (laporan)	1	-	-	-
2	Jumlah Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Banyuwangi (Orang)	3,763	-	-	-
3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)	5,353	1.000	1.710	120
4	Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,78	0,12	0,19	120
5	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	120	-	-	-
II. Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan					
6	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)	1	-	-	-
7	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)	1	-	-	-
III. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	71,5	-	-	-
9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100	75	87,27	116,36
10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83	-	-	-

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
11	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	85	85	85	100
12	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	80	-	-	-
13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)	80	-	-	-
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	80	80	100	120
15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPP Banyuwangi (Nilai)	92	-	-	-
IV. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
16	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi	5.996	4.000	5.000	120
17	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi	216	130	200	120
18	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	791	267	350	120
19	Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)	44	22	40	120
V. Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan					
20	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di Satker BPPP Banyuwangi (Paket)	1	-	-	-
VI. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
21	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi	15	-	-	-

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya pelatihan SDM kelautan dan perikanan terdapat 5 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 1) Laporan Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (*Smart Fisheries Village/SFV*) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (laporan), 2) Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Banyuwangi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (orang) 3) Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang Dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang), 4) Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar) dan 5) Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (orang). Sasaran program ini didukung anggaran dari BPPP Banyuwangi dengan pagu sebesar Rp. 394,319,000,00 dan realisasi sebesar Rp. 174,437,030,00 dengan persentase 42,44 %. Adapun capaian sasaran strategi tersebut dapat diraih dari indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 1

Laporan Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village / SFV) BPPP Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (laporan)

Konsep *Smart Fisheries Village* (SFV) merupakan inisiatif strategis KKP yang bertujuan membangun sektor perikanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Konsep SFV ini dilaksanakan di Desa Ngablak dengan mengadopsi tiga pilar utama: (1) *Circular Economy* untuk pemanfaatan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan; (2) Pengembangan ekonomi berbasis digital melalui pelatihan talenta dan UKM; dan (3) Mekanisme kerja sama melalui kemitraan publik-swasta (*Public Private Partnership*). Pada Triwulan III belum terdapat target pada indikator ini dan juga tidak dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan IKU baru. Kegiatan yang telah diimplementasikan yaitu Pembangunan 20 unit Kolam Bundar berbahan terpal dengan diameter 3 meter.

Indikator Kinerja Utama 2

Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Banyuwangi (%)

Jumlah lulusan pelatihan terserap DUDI merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha pada semester 2 Tahun sebelumnya dan semester 1 Tahun berjalan yang telah bekerja di DUDI dan atau menerapkan hasil pelatihan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada Triwulan III belum terdapat target pada indikator ini sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target antara lain :

1. Telah terbitnya Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 407 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pelatihan Kelautan dan Perikanan
2. Pada Triwulan III telah diperoleh data sementara pencapaian DUDI sebanyak 1.240 orang
3. Pendataan purnawidya berdasarkan wilayah dan kompetensi bidang yang diikuti
4. Mengklasifikasikan peserta sebagai pelaku utama/pelaku usaha perikanan, sebagai pelaku utama/pelaku usaha perikanan yang telah memiliki kelompok dan pelaku utama/pelaku usaha perikanan yang bekerja di perusahaan perikanan.

Indikator Kinerja Utama 3

Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan regular (full tatap muka) dan pelatihan full online, dan peserta hanya satu kali mengikuti pelatihan di tahun yang sama, kecuali pelatihan dengan level kompetensi lebih tinggi dengan formula perhitungan akumulasi jumlah masyarakat KP yang

telah mengikuti pelatihan sesuai kriteria pelatihan. IKU ini didukung anggaran dengan pagu Rp. 310.510.000,00 dan realisasi Rp 91.441.900,00 dengan persentase capaian 29,45%. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih diperoleh dari data Katimja Pelatihan dan capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Capaian indikator Kinerja 3 Triwulan III Tahun 2025

IKU 3-Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)									
Realisasi TW 3				2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025– 2029	
2021	2022	2023	2024	Target Tw 3	Realisasi Tw 3	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
4.348	3.109	3.453	7.475	1.000	1.710	120	-77,12	5.353	31,94

A. Capaian Tahun 2025

Pada Triwulan III Tahun 2025, jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dilatih di BPPP Banyuwangi mencapai 1.710 orang dari target 1.000 orang, dengan tingkat capaian sebesar 120%.

B. Capaian Indikator Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi fluktuasi capaian jumlah masyarakat yang dilatih. Pada tahun 2023 tercatat 3.453 orang, sedangkan tahun 2024 meningkat tajam menjadi 7.475 orang, namun pada tahun 2025 (realisasi Triwulan III) tercatat 1.710 orang. Berdasarkan perhitungan, persentase kenaikan dari tahun 2024 ke 2025 sebesar -77,12%, yang menunjukkan penurunan dibanding capaian tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga jumlah pelatihan yang dilaksanakan menurun.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi.

Berdasarkan dokumen Renstra BPPP Banyuwangi 2025–2029, target untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah 5.353 orang. Hingga Triwulan III Tahun 2025, capaian sebanyak 1.710 orang baru mencapai sekitar 31,94% dari target tahunan. Capaian yang masih di bawah target tahunan ini terutama dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan pengurangan volume kegiatan pelatihan. Namun demikian, BPPP

Banyuwangi tetap berupaya memaksimalkan pelaksanaan pelatihan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada serta memanfaatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra strategis lainnya serta menggunakan pelatihan sistem daring.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Perbandingan realisasi Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	1.000	1.710	120,00
2	BPPP Tegal	11.144	13.438	120,00
3	BPPP Bitung	400	400	100,00
4	BPPP Ambon	240	255	106,25
5	BPPP Medan	200	226	113,00

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh UPT pelatihan di bawah BPPSDMKP berhasil mencapai target kinerjanya dengan capaian di atas 100%. BPPP Banyuwangi dan BPPP Tegal menempati posisi teratas dengan capaian 120%, menandakan kemampuan keduanya dalam melaksanakan program pelatihan secara efisien dan adaptif. Meskipun terdapat penurunan total peserta dibanding tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran, BPPP Banyuwangi tetap mampu mempertahankan kinerja relatif tinggi di antara UPT lain, menunjukkan kapasitas kelembagaan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pelatihan yang baik.

E. Analisis Keberhasilan/Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian target disebabkan karena telah tersedianya pedoman penyelenggaraan pelatihan, kurikulum dan modul yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi masyarakat KP, instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang dilatihkan, dan sarana prasarana yang terstandar

D. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi sumberdaya manusia bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan

masyarakat dilakukan oleh widyaiswara/instruktur serta dibantu oleh penyuluh perikanan PNS dan PBB yang berada dilokasi pelatihan

F. Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan penunjang yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya pelatihan di beberapa bidang yaitu kepelautan, kelautan, budidaya, diversifikasi produk olahan perikanan, dan yang dilakukan secara daring sehingga banyak peserta pelatihan yang dapat dijangkau.

Indikator Kinerja Utama 4

Nilai PNBP BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)

IKU ini merupakan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. IKU ini dukungan anggaran dengan pagu Rp. 783.175.000,00 dan realisasi 0 karena adanya blokir anggaran, sedangkan target pencapaian kinerja PNBP sebesar 194.397.185 (0,19 miliar rupiah) berdasarkan Nota Dinas dari Sekretariat BPPSDMKP Nomor 3143/BPPSDM.1/KU.340/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 perihal Capaian Kinerja PNBP Triwulan III Tahun 2025 Capaian IKU nilai PNBP BPPP Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Capaian indikator Kinerja 4 Triwulan III Tahun 2025

IKU 4. Nilai PNBP BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)									
Realisasi TW 3				2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target Tw 3	Realisasi Tw 3	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	0,47	1,35	0,12	0,19	120	-85,93	0,78	24,36

A. Capaian tahun 2025

Pada Triwulan III Tahun 2025, nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh BPPP Banyuwangi mencapai Rp0,19 miliar dari target Rp0,12

miliar atau sebesar 120% dari target triwulan. Capaian ini menunjukkan kinerja yang melampaui target triwulan.

B. Capaian Indikator Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai PNBPN BPPPN Banyuwangi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, nilai PNBPN tercatat sebesar Rp0,47 miliar, meningkat signifikan menjadi Rp1,35 miliar pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025 (hingga Triwulan III), realisasi PNBPN baru mencapai Rp0,19 miliar, dengan persentase penurunan sebesar -85,93% dibanding tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena kebijakan efisiensi anggaran dan adanya blokir anggaran 100% serta penyesuaian jadwal pelatihan kerja sama yang direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan IV.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPPN Banyuwangi Berdasarkan Renstra BPPPN Banyuwangi 2025–2029, target PNBPN untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp0,78 miliar. Dengan capaian hingga Triwulan III sebesar Rp0,19 miliar, tingkat capaian terhadap target tahunan baru mencapai 24,36%. Capaian ini menunjukkan bahwa hingga Triwulan III, kinerja PNBPN masih di bawah target Renstra.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Perbandingan realisasi Nilai PNBPN Triwulan III Tahun 2025 dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPPN Banyuwangi	0,12	0,19	120
2	BPPPN Tegal	14,26	20,17	120
3	BPPPN Bitung	0,07	0,12	120
4	BPPPN Ambon	0,55	0,66	120
5	BPPPN Medan	0,04	0,05	120

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa seluruh UPT pelatihan di bawah BPPSDMKP berhasil mencapai target PNBPN Triwulan III dengan persentase diatas 100%. BPPPN Banyuwangi menempati posisi setara dengan UPT lain dalam hal persentase capaian, menunjukkan efektivitas strategi



pengelolaan kegiatan berbayar di tengah keterbatasan anggaran. Capaian ini juga menggambarkan upaya BPPP Banyuwangi dalam menjaga konsistensi kinerja keuangan serta mendukung kontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara melalui PNBP sektor pelatihan kelautan dan perikanan.

E. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung

Sebagian besar PNBP diperoleh melalui pemanfaatan layanan yang diberikan serta ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung. Selain itu juga adanya komitmen pimpinan dengan penandatanganan kontrak kinerja PNBP serta upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pelatihan.

F. Analisis Program / Faktor Pendukung

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya :

1. Penggunaan sarana dan prasarana
2. Penjualan peralatan dan mesin
3. Pemanfaatan sarana kolam bundar untuk budidaya ikan lele
4. Penghapusan atau penjualan kendaraan dan sarana lainnya yang tidak terpakai.

G. Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan penunjang yang dilakukan untuk pencapaian kinerja ini adalah:

1. Kegiatan penunjang yang dilakukan untuk pencapaian kinerja ini adalah dengan melaksanakan penghapusan kendaraan dan sarana lainnya yang tidak terpakai
2. Penggunaan sarana serta pemanfaatan kolam bundar untuk budidaya lele.

Indikator Kinerja Utama 5

SDM KP yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi adalah yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian. Sertifikat dikeluarkan oleh LSP/BNSP dan atau Lembaga Sertifikasi lainnya. IKU ini didukung dengan anggaran Rp. 63.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 dikarenakan adanya blokir anggaran. dengan persentase capaian -%. Pada Triwulan III belum terdapat target pada indikator ini sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Pada Sasaran strategis ini, pencapaiannya didukung dengan adanya kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan jumlah IKU pendukung sebanyak 2 IKU. Adapun dukungan anggaran untuk realisasi IKU berasal dari BPPP Banyuwangi dengan pagu sebesar Rp 0 dan realisasi sebesar Rp.0,00 dengan tingkat persentase 0 %. dan capaian sasaran strategi tersebut dapat diraih dari indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 6

Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)

IKU ini merupakan Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP Banyuwangi. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja oleh satuan kerja BPPP Banyuwangi dengan formulasi penghitung jumlah sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal. IKU ini didukung anggaran dengan pagu Rp.0 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 dengan persentase sebesar 0%. Penilaian IKU ini dilaksanakan di akhir tahun 2025. IKU ini berpotensi tidak tercapai pada tahun ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan 100% anggaran untuk prasarana diblokir.

Indikator Kinerja Utama 7

Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Banyuwangi (unit)

IKU ini merupakan IKU Peningkatan kapasitas prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja BPPP Banyuwangi dengan formulasi penghitung Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal. IKU ini juga didukung anggaran dengan pagu Rp 0 dan realisasi Rp.0,- dengan persentase sebesar 0%. IKU ini berpotensi tidak tercapai pada tahun ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan 100% anggaran untuk prasarana diblokir.

Sasaran Kegiatan 3

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Pada Sasaran strategis ini, pencapaiannya didukung dengan adanya kegiatan layanan dukungan manajemen BPPP Banyuwangi dengan jumlah IKU pendukung sebanyak 8 (delapan) IKU dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.650.340.000,00 dan realisasi Rp. 68.763.035.272 dengan persentase sebesar 75,86%. Adapun capaian sasaran strategi tersebut dapat diraih dari indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 8

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (nilai)

IKU Nilai Kinerja Anggaran BPPP Banyuwangi (nilai) merupakan salah satu IKU dalam Pencapaian sasaran strategis terpenuhinya layanan dukungan manajemen BPPP Banyuwangi. IKU ini berfungsi untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi output. IKU ini didukung oleh anggaran dengan sebesar Rp. 42.245.000,00 dan realisasi Rp. 34.619.086 dengan persentase sebesar 81,95%. Pencapaian indikator ini berdasarkan penginputan perencanaan pada aplikasi OMSPAN. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilakukan pada akhir tahun 2025. Guna mencapai keberhasilan indikator ini BPPP Banyuwangi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pada masing-masing indikator yang merupakan IKU tahunan.

Indikator Kinerja Utama 9

Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)

IKU ini Merupakan indikator yang menunjukkan laporan yang mendukung kegiatan manajemen internal BPPP Banyuwangi. IKU ini didukung oleh anggaran dengan pagu Rp. 90.608.095.000,00 dan realisasi Rp. 68.728.416.186 dengan persentase sebesar 75,85% dan capaian indikator layanan dukungan manajemen internal triwulan III tahun 2025 capaian dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Capaian indikator kinerja 9 Tahun 2025

IKU 9-Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)									
Realisasi TW 3				2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target Tw 3	Realisasi Tw 3	% Capaian	% Kenaikan 2024- 2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
0	0	78,38	77,27	75,00	87,27	116,36	12,94	100	87,27

A. Capaian Tahun 2024

Pada Triwulan III Tahun 2025, persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi mencapai 87,27% dari target 75%, dengan tingkat capaian sebesar 116,36%. Capaian ini menunjukkan peningkatan kinerja yang positif dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu 77,27% pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 12,94% ini mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam pelaksanaan fungsi dukungan manajemen internal, termasuk aspek administrasi, tata kelola keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan periode 2021–2024, terlihat adanya tren peningkatan yang stabil. Pada tahun 2021 dan 2022, indikator ini belum muncul sebagai IKU. Seiring dengan peningkatan sistem tata kelola dan manajemen internal, capaian meningkat menjadi 78,38% (2023) dan sedikit menurun menjadi 77,27% (2024) sebelum akhirnya melonjak kembali menjadi 87,27% (2025). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembenahan sistem dukungan manajemen memberikan hasil nyata pada

tahun berjalan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi.

Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029 sebesar 100%, capaian tahun 2025 sebesar 87,27% menunjukkan bahwa kinerja layanan dukungan manajemen internal sudah cukup baik dengan tingkat capaian terhadap target Renstra sebesar 87,27%.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	75	87,27	116,36
2	BPPP Tegal	75	77,50	103,33
3	BPPP Bitung	75	75,00	100,00
4	BPPP Ambon	75	81,67	108,89
5	BPPP Medan	75	78,18	104,24

Dari tabel di atas terlihat bahwa BPPP Banyuwangi mencatat capaian tertinggi (116,36%) di antara seluruh UPT lingkup BPPSDMKP. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam efektivitas layanan manajemen internal, termasuk perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan. Kinerja ini menegaskan bahwa BPPP Banyuwangi telah berhasil menyesuaikan strategi manajemen internal secara adaptif dan responsif terhadap dinamika kebijakan efisiensi anggaran, sekaligus memperkuat peran kelembagaan dalam mendukung pencapaian target kinerja pelatihan.

E. Analisis Keberhasilan/Faktor Pendukung Keberhasilan

Capaian indikator ini dapat berhasil karena telah tersusunnya laporan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi, 48 dokumen itu adalah:

- Dokumen Realisasi Anggaran sebanyak 9 dokumen
- Laporan BMN sebanyak 2 dokumen
- Laporan Survey Kepuasan 3 dokumen

- Kertas kerja perencanaan (RKAKL dan DIPA) sebanyak 6 dokumen
- Laporan kinerja sebanyak 3 dokumen
- Manual IKU sebanyak 1 dokumen
- Rencana aksi sebanyak 2 dokumen
- Laporan Tahunan 1 dokumen
- Laporan Program/Kegiatan 1 dokumen
- Matrik manajemen risiko sebanyak 1 dokumen
- Laporan Keuangan 1 dokumen
- Laporan keterbukaan informasi publik (KIP) sebanyak 1 dokumen
- Rekapitulasi Arsip 2 dokumen
- Printscreen aplikasi kinerjaku, Bappenas, OMSPAN sebanyak 12 dokumen

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya Efisiensi sumberdaya

Pada aspek sumber daya manusia, efisiensi dicapai melalui peningkatan produktivitas pegawai dan penerapan pola kerja yang adaptif. Beberapa pegawai dilibatkan lintas bidang untuk mendukung kegiatan prioritas, sehingga beban kerja dapat tersebar merata tanpa penambahan tenaga baru.

G. Analisis Program / Faktor Pendukung Kinerja

IKU ini dapat tercapai dengan diselesaikan semua dokumen antara lain laporan penyusunan keuangan, BMN, SPIP, laporan bulanan dan laporan kinerja, dokumen rencana aksi dan perjanjian kinerja dan laporan survey kepuasan masyarakat

Indikator Kinerja Utama 10

Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASNKKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IKU ini didukung oleh anggaran dengan pagu sebesar Rp. 90.581.245.000,00 dan realisasi Rp. 68.702.601.886,00 dengan persentase sebesar 75,90 %. Nilai IKU ini diperoleh berdasarkan dashboard IP ASN pada laman <https://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/unker/962?page=1>. Pada Triwulan II Nilai IPASN BPPP Banyuwangi telah mencapai nilai 76,56. Pada Triwulan III tidak ada pengukuran karena baru akan dilaksanakan di akhir tahun.

Indikator Kinerja Utama 11

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan utk perbaikan kinerja BPPPBanyuwangi (%)

Berdasarkan jumlah rekomendasi hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen KKP pada lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) oleh Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode Triwulan III Tahun 2025 tidak ada temuan atau pun rekomendasi pada BPPP Banyuwangi sehingga persentasenya dianggap senilai 85%. Capaian IKU ini pada triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja 11 Tahun 2025

IKU-11 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan utk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)								
Realisasi TW III			2025				Renstra KKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	85	85	100	-	85	100

A. Capaian Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan II Tahun 2025, BPPP Banyuwangi mencatat realisasi pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan sebesar 85%, yang sesuai dengan target triwulanan sebesar 85%, sehingga



capaian indikator ini mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti secara efektif dan digunakan secara maksimal dalam perbaikan manajemen internal dan peningkatan kualitas layanan di BPPP Banyuwangi. Capaian ini menjadi indikator penting atas kesiapan satuan kerja dalam menyerap dan mengimplementasikan masukan dari proses pengawasan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Pada tahun 2025, indikator ini menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu 85% dengan capaian 100% terhadap target. Namun, karena data capaian pada tahun-tahun sebelumnya (2022–2024) tidak terdapat target pada periode yang sama, maka perbandingan secara kuantitatif belum dapat dilakukan. Meskipun demikian, capaian penuh pada tahun 2025 dapat dijadikan titik awal positif bagi pengukuran tren implementasi rekomendasi hasil pengawasan dalam tahun-tahun mendatang, sekaligus sebagai *baseline* untuk monitoring jangka panjang.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi Target Renstra BPPP Banyuwangi 2025–2029 untuk indikator ini pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 85%, dan realisasi hingga Triwulan II telah mencapai 85% pula. Dengan demikian, capaian terhadap target mencapai 100%, yang mencerminkan keselarasan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan di lapangan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi telah berjalan secara fungsional, serta mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15. Perbandingan realisasi Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	85	85	100,00
2	BPPP Tegal	85	100	117,65
3	BPPP Bitung	85	85	100,00
4	BPPP Ambon	85	85	100,00
5	BPPP Medan	85	85	100,00

Berdasarkan tabel di atas, seluruh UPT pelatihan lingkup BPPSDMKP menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap hasil pengawasan dengan capaian 100% atau lebih. BPPP Banyuwangi mencatat capaian 100%, menunjukkan bahwa semua rekomendasi hasil audit dan pengawasan telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja internal, khususnya pada aspek pelaporan, pengadaan barang dan jasa, serta tata kelola administrasi. Sementara itu, BPPP Tegal mencapai capaian tertinggi (117,65%), karena pada periode sebelumnya terdapat temuan audit yang telah ditindaklanjuti secara tuntas 100% pada triwulan III pada tahun 2025 sehingga mencerminkan komitmen kuat terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan serta kinerja kelembagaan..

E. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam memanfaatkan 100% rekomendasi hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan kinerja menunjukkan bahwa terdapat sistem yang baik dalam manajemen tindak lanjut hasil pengawasan. Faktor pendukung utama keberhasilan ini meliputi:

- 1) Respons cepat terhadap temuan pengawasan, baik dari internal maupun eksternal (misalnya dari Itjen).
- 2) Adanya komitmen pimpinan dan tim kerja untuk menjadikan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi rutin dan dasar perbaikan sistem.
- 3) Dokumentasi dan pelaporan yang tertib, yang memudahkan pemantauan dan pengukuran efektivitas tindak lanjut.
- 4) Koordinasi lintas unit kerja yang berjalan efektif dalam mengimplementasikan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang

diterima.

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Pemanfaatan hasil pengawasan secara penuh berdampak pada efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan adanya perbaikan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi yang menyasar proses kerja yang berisiko pemborosan atau inefisiensi, serta implementasi rekomendasi memperkuat sistem pengendalian internal, yang secara langsung menekan potensi kesalahan, duplikasi kerja, dan inefisiensi anggaran.

G. Analisis Program / Faktor Keberhasilan

Pemanfaatan rekomendasi pengawasan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga dimaknai sebagai alat perbaikan manajemen program. Faktor keberhasilan pelaksanaan program yang berbasis rekomendasi pengawasan dilakukan melalui:

1. Menerapkan sistem monitoring evaluasi berkala yang memastikan bahwa setiap rekomendasi yang masuk dikaji, dijadwalkan tindak lanjutnya, dan dilaporkan progresnya.
2. Membuka diri terhadap kritik dan audit sehingga rekomendasi tidak dianggap sebagai temuan semata, tetapi bagian dari proses peningkatan kinerja.
3. Menerapkan budaya kerja yang adaptif terhadap pembaruan prosedur, sehingga perbaikan sistem atau SOP dari hasil pengawasan bisa langsung diintegrasikan ke dalam aktivitas unit kerja.

Indikator Kinerja Utama 12

Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (nilai)

IKU ini merupakan IKU Nilai PM SAKIP Satker dihitung berdasarkan Permen PANDan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Satker. Nilai PM SAKIP Satker adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri

dari Tim SAKIP BPPSDM. IKU ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 90.581.245.000,00 dan realisasi Rp. 68.702.601.886,00 dengan persentase sebesar 75,90 %.

Pengukuran dilaksanakan di akhir periode atau Triwulan IV. Pada Triwulan III upaya yang telah dilakukan seperti penginputan dokumen perencanaan kinerja pada aplikasi SAKIP meliputi RENSTRA, laporan kinerja, rencana aksi, SKP, perjanjian kinerja, serta dokumen perencanaan kinerja yang telah dipublikasi serta penilaian oleh tim money Sekretarian BPPSDMKP. Selain itu, dokumen penilaian mandiri SAKIP telah disusun dari awal tahun sebagai dokumen persyaratan pemenuhan dokumen Kinerja per triwulan dan melakukan penyimpanan dokumen penilaian mandiri SAKIP terletak pada *Google Drive* milik BPPP Banyuwangi

Indikator Kinerja Utama 13

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)

IKU ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran kepatuhan pengelolaan BMN di lingkup BPPSDMKP Tahun 2025 didasarkan pada tujuh unsur dengan bobot nilai, yaitu: ketersediaan dokumen RKBMN 2026 (5%), pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL 2025 (7,5%), usulan penetapan status penggunaan BMN hingga Triwulan III (25%), usulan pemindahtanganan/penghapusan BMN rusak berat (25%), penggunaan BMN hasil belanja modal 2024 disertai BAST/BAP (20%), penyusunan laporan BMN semesteran dan tahunan tepat waktu (12,5%), serta usulan RKBMN 2027 (5%). Total bobot keseluruhan mencapai 100%. Pada triwulan ini tidak ada target capaian.

Indikator Kinerja Utama 14

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP.

Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja 14 Tahun 2025

IKU-14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)								
Realisasi TW III			2025				Rancangan Indikator dan Target Capaian BPPP Banyuwangi 2025 – 2029	
2022	2023	2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	80	100	120	-	80	100

A. Capaian Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada triwulan III Tahun 2025, BPPP Banyuwangi mencatat capaian 100% dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dari target sebesar 80%, sehingga menghasilkan capaian 120% terhadap target. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh paket pengadaan yang direncanakan telah diumumkan secara terbuka dan tepat waktu melalui sistem yang ditentukan, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru sehingga belum dapat dibandingkan

dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Target Renstra BPPP Banyuwangi tahun 2025 untuk indikator ini ditetapkan sebesar 80%, dan pada Triwulan II capaian telah mencapai 100%, atau 120% terhadap target. Hal ini menandakan bahwa proses perencanaan dan publikasi pengadaan telah dilakukan secara proaktif dan melebihi ekspektasi. Capaian ini mencerminkan kedisiplinan unit kerja dalam menyiapkan dokumen pengadaan sejak awal tahun anggaran, serta kesiapan dalam mengintegrasikan seluruh perencanaan ke dalam sistem SIRUP sebagaimana diamanatkan oleh peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17. Perbandingan realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	80	100	120,00
2	BPPP Banyuwangi	80	100	120,00
3	BPPP Bitung	80	100	120,00
4	BPPP Ambon	80	100	120,00
5	BPPP Medan	80	100	120,00

Pada Triwulan III Tahun 2025, seluruh UPT lingkup BPPSDM KP, termasuk BPPP Banyuwangi, menunjukkan capaian maksimal dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). BPPP Banyuwangi mencatat realisasi sebesar 100% dari target 80%, atau mencapai 120% capaian, sama seperti yang dicapai oleh BPPP Tegal, Bitung, Ambon, dan Medan. Keseragaman capaian ini menandakan bahwa seluruh UPT telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan

terhadap regulasi pengadaan pemerintah. Bagi BPPP Banyuwangi, capaian ini juga mencerminkan bahwa proses perencanaan dan kesiapan pengadaan sudah dilakukan dengan baik sejak awal tahun, sekaligus memperkuat posisi lembaga dalam penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik secara optimal.

E. Analisis Keberhasilan/Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam mencapai 100% pengumuman RUP pada SIRUP dari target 80% (capaian 120%) menunjukkan penerapan manajemen pengadaan yang sangat baik. Faktor-faktor pendukung keberhasilan ini antara lain:

1. Adanya perencanaan awal tahun yang matang dan terintegrasi sehingga seluruh paket pengadaan telah teridentifikasi lebih awal.
2. Koordinasi erat antara perencana anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan tim pengadaan, yang memastikan semua kegiatan terinput dalam sistem tepat waktu.
3. Pemanfaatan sistem SIRUP secara optimal, serta pemahaman SDM terhadap prosedur dan regulasi pengadaan berbasis elektronik.
4. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala, yang mendorong disiplin waktu dalam pelaksanaan dan pelaporan.
5. Pemahaman regulasi LKPP dan sistem SIRUP yang memadai oleh tim pelaksana pengadaan.

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi ini tampak dari tidak adanya keterlambatan dalam penginputan RUP, yang secara langsung mengurangi risiko terjadinya tender ulang, keterlambatan realisasi kegiatan, serta potensi pemborosan anggaran. Selain itu, proses dokumentasi pengadaan yang telah terintegrasi dalam sistem informasi memungkinkan penghematan waktu dan tenaga kerja administratif.

G. Analisis Program/Faktor Keberhasilan

Keberhasilan program pengadaan tahun 2025, khususnya dalam aspek

publikasi RUP, ditopang oleh beberapa program yaitu:

1. Mengikuti pelatihan dan pembekalan teknis, khususnya terkait sistem pengadaan berbasis elektronik.
2. Pimpinan unit kerja ikut melakukan pengawasan yang menjadikan keterbukaan dalam pengadaan sebagai bagian dari budaya organisasi.

Indikator Kinerja Utama 15

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPP Banyuwangi (Nilai)

IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (nilai) merupakan salah satu IKU dalam Pencapaian sasaran strategis terpenuhinya layanan dukungan manajemen BPPP Banyuwangi. IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah alat ukur yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pemerintah (satker). Nilai IKPA diberikan dalam bentuk angka persentase dan mencerminkan sejauh mana satker mampu melaksanakan anggaran secara efisien, tepat waktu, dan sesuai aturan. IKPA menjadi bagian penting dalam sistem evaluasi anggaran karena menunjukkan apakah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara optimal untuk mencapai output dan hasil yang direncanakan. IKU ini berfungsi untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi output. IKU ini didukung anggaran dengan pagu sebesar Rp. 42.245.000,00 dan realisasi Rp. 16.108.086 dengan persentase sebesar 81,95%. Pencapaian indikator ini berdasarkan penginputan perencanaan pada aplikasi OMSPAN. Pada triwulan III ini tidak ada target capaian.

Sasaran Kegiatan VI

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pada sasaran program ini, pencapaiannya didukung dengan adanya kegiatan penyuluhan dengan jumlah IKU pendukung sebanyak 6 IKU dan dukungan anggaran dari BPPP Banyuwangi dengan pagu sebesar Rp. 4.863.866.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.325.656.164,00 dengan persentase sebesar 88,93%. Adapun capaian sasaran strategi tersebut dapat diraih dari indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 16

Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Banyuwangi (kelompok)

IKU ini merupakan Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti : Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan. Dengan format perhitungan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh oleh penyuluh perikanan. IKU ini didukung oleh anggaran dengan pagu Rp. 4.863.866.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.325.656.164,00 dengan persentase sebesar 88,93%. Pencapaian IKU Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh pada Tahun 2025 diperoleh dari sumber Tim Kerja Penyuluhan BPPP Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Indikator kinerja Utama 16 Triwulan III Tahun 2025

IKU 16-Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh BPPP Banyuwangi (Kelompok)									
Realisasi TW 3				2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target Tw 3	Realisasi Tw 3	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
2.308	2.744	2.577	4.700	4.000	5.000	120	6,38	5.996	83,38

A. Capaian Tahun 2025

Pada Triwulan III Tahun 2025, BPPP Banyuwangi berhasil menyuluh 5.000 kelompok pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dari target 4.000 kelompok, sehingga capaian kinerja mencapai 120%. Capaian ini menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dan menggambarkan efektivitas kegiatan penyuluhan yang dilakukan baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung melalui media digital dan kolaborasi lintas instansi.

B. Perbandingan Capaian dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian penyuluhan tahun 2025 meningkat 6,38% dari realisasi tahun 2024 sebesar 4.700 kelompok. Kenaikan ini menunjukkan keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam memperluas jangkauan sasaran penyuluhan serta meningkatkan partisipasi pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah binaan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Jika dibandingkan dengan target Renstra BPPP Banyuwangi 2025–2029 sebesar 5.996 kelompok, capaian tahun 2025 sebesar 5.000 kelompok setara dengan 83,38% dari target Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyuluhan berada pada jalur yang baik dan berpotensi mencapai target tahunan bila tren peningkatan ini dipertahankan hingga akhir tahun.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Perbandingan realisasi kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	4.000	5.000	120,00
2	BPPP Tegal	50	50	100,00
3	BPPP Bitung	1.500,00	1.504,00	100,27
4	BPPP Ambon	2.000	2.050	102,50
5	BPPP Medan	3.150	3.544	112,51

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa seluruh UPT lingkup BPPSDMKP mencapai atau melampaui target penyuluhan Triwulan III Tahun 2025 dengan capaian di atas 100%. BPPP Banyuwangi mencatat capaian tertinggi sebesar 120%, menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjangkau lebih banyak kelompok sasaran dibandingkan target awal. Sementara BPPP Medan (112,51%) dan BPPP Ambon (102,50%) juga menunjukkan

peningkatan yang signifikan.

E. Analisis Keberhasilan / Faktor Penunjang Keberhasilan

Kegiatan monitoring capaian IKU yang dilaksanakan oleh Satminkal Penyuluhan dengan melakukan evaluasi kinerja penyuluh melalui laporan kegiatan penyuluhan yang disertakan dengan data dukung dan SKP beserta dokumennya

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja dan BOP penyuluh PNS dan Honor serta BOP PPB dapat terealisasi secara optimal dengan terpenuhinya target kinerja yang telah ditentukan
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang *ter-cascading* langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

G. Analisis Program / Faktor Keberhasilan

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah telah dilakukannya pendampingan terhadap kelompok binaannya seperti pendampingan dalam bantuan modal, bantuan pemerintah, pendampingan dalam kemitraan / pasar, pendampingan penginputan atau pendaftaran KUSUKA, pendampingan penilaian kelas kelompok dan peningkatan kelas kelompok.

Indikator Kinerja Utama 17

Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)

Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Banyuwangi merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai dengan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, dengan formula perhitungan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP

yang meningkat kelas kelompoknya sesuai Kepmen KP No. 14 Tahun 2012. IKU ini didukung dengan anggaran dengan pagu Rp. 4.863.866.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.325.656.164,00 dengan persentase sebesar 88,93%. Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Banyuwangi Tahun 2025 diperoleh dari sumber Tim Kerja Penyuluhan BPPP Banyuwangi serta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Capaian indikator Kinerja 17 Tahun 2025

IKU 17 - Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)									
Realisasi TW 3				2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target Tw 3	Realisasi Tw 3	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
0	0	0	170	130	200	120	17,65	216	92,59

A. Capaian Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III Tahun 2025, BPPP Banyuwangi berhasil meningkatkan kelas 200 kelompok pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari target 130 kelompok, dengan capaian 120%.

B. Perbandingan Capaian dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebanyak 170 kelompok, maka pada tahun 2025 terjadi kenaikan sebesar 17,65%. Peningkatan ini merupakan hasil dari kegiatan pembinaan berkelanjutan terhadap kelompok pelaku utama, khususnya dalam hal administrasi, perencanaan usaha, manajemen produksi, serta akses pembiayaan dan pasar.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029 sebesar 216 kelompok, maka capaian tahun 2025 sebesar 200 kelompok telah mencapai 92,59% dari target Renstra.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional

karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang ditingkatkan Kelasnya di Satker BPPP Banyuwangi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	130	200	120,00
2	BPPP Bitung	48,00	55,00	114,58
3	BPPP Ambon	16	20	120,00
4	BPPP Medan	70	84	120,00

Capaian BPPP Banyuwangi sebesar 120% menunjukkan bahwa target peningkatan kelas kelompok pelaku utama dan pelaku usaha telah terlampaui dengan baik. Pencapaian ini sejalan dengan beberapa UPT lain seperti BPPP Ambon dan BPPP Medan yang juga mencapai 120%, serta BPPP Bitung dengan capaian 114,58%.

E. Analisis Keberhasilan / Faktor Penunjang Keberhasilan

Kegiatan monitoring capaian IKU yang dilaksanakan oleh Satminkal Penyuluhan dengan melakukan evalusai kinerja penyuluh melalui laporan kegiatan penyuluhan yang disertakan dengan data dukung dan SKP beserta dokumennya

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerjadan BOP penyuluh PNS dan Honor serta BOP PPB dapat terealisasi secara optimal dengan terpenuhinya target kinerja yang telah ditentukan
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.
3. Program dilakukan berbasis data dan kebutuhan, sehingga intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran dan tidak menghabiskan sumber daya secara sia-sia. Dalam banyak kasus, penyuluhan peningkatan kelas

dilakukan bersamaan dengan kegiatan pendampingan teknis lainnya, sehingga menghemat waktu dan biaya transportasi penyuluh

G. Analisis Program/Faktor Keberhasilan

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah dengan dilakukannya penilaian kelas kelompok sehingga diperoleh skor penilaian yang akan menentukan naik tidaknya kelas kelompok. Peningkatan kelas kelompok naik dimulai dari pemula ke madya dan madya ke utama.

Indikator Kinerja Utama 18

Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang dibentuk di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)

IKU Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di Satker BPPP Banyuwangi merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dengan formula perhitungan Jumlah kelompok Pelaku utama yang dibentuk yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penumbuhan kelompok. Capaian IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok) sumber data diperoleh dari Tim Kerja Penyuluhan BPPP Banyuwangi dan capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja 18 Tahun 2025

IKU 18-Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di Satker BPPP Banyuwangi (Kelompok)									
Realisasi TW 3				2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target Tw 3	Realisasi Tw 3	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
297	249	370	400	267	350	120	-12,5	791	44,24

A. Capaian Tahun 2025

Pada Triwulan III Tahun 2025, BPPP Banyuwangi berhasil membentuk 350 kelompok pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari target 267 kelompok, dengan capaian 120%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kelompok yang dibentuk pada 2025 menurun dari 400 kelompok pada tahun 2024 menjadi 350 kelompok pada tahun 2025, atau turun sebesar 12,5%.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Dibandingkan dengan target Renstra BPPP Banyuwangi tahun 2025–2029 sebesar 791 kelompok, capaian tahun 2025 sebesar 350 kelompok baru mencapai 44,24%.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	267	350	120,00
2	BPPP Bitung	100	120	120,00
3	BPPP Ambon	60	80	120,00
4	BPPP Medan	370	410	110,81

Capaian BPPP Banyuwangi sebesar 120% menunjukkan bahwa kinerja pembentukan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha telah melampaui target yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2025. Capaian ini sejalan dengan BPPP Bitung dan BPPP Ambon yang juga mencapai 120%, serta BPPP Medan yang mencatat capaian 110,81%.

E. Analisis Keberhasilan/ Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pembentukan 350 kelompok atau 120% capaian terhadap target triwulan menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi berhasil menjalankan program ini secara efektif. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor pendukung utama antara lain:

1. Ketersediaan basis data masyarakat sasaran yang telah dipetakan lebih awal, memudahkan proses identifikasi dan mobilisasi pembentukan kelompok.

2. Pendekatan partisipatif penyuluh yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam proses pembentukan, menciptakan rasa kepemilikan di tingkat akar rumput.
3. Adanya sinergi dengan program lain seperti pelatihan, bantuan sarana, dan fasilitasi pemasaran yang memperkuat minat masyarakat untuk membentuk kelompok formal.
4. Komitmen manajemen dan dukungan lintas sektor, seperti Dinas KP daerah dan lembaga pendukung usaha, yang mempercepat proses legalisasi dan pengorganisasian kelompok.
5. Kesadaran Pelaku utama/ Pelaku usaha KP tentang pentingnya membentuk kelompok terkait kemudahan akses untuk mendapatkan bantuan, pemodal usaha dan kegiatan pelatihan

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Capaian yang tinggi dapat dicapai dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya, baik dari sisi waktu, anggaran, maupun tenaga pendamping. Beberapa bentuk efisiensi yang tampak adalah:

1. Integrasi kegiatan pembentukan kelompok dengan program lainnya, seperti pelatihan atau pendampingan budidaya, sehingga pelaksanaannya hemat biaya dan waktu.
2. Pemanfaatan tenaga penyuluh lokal dan jejaring kelompok eksisting yang membantu memfasilitasi terbentuknya kelompok baru tanpa biaya tambahan.
3. Digitalisasi pelaporan dan koordinasi memungkinkan pemantauan pembentukan kelompok dilakukan lebih cepat dan efisien.
4. Adanya efisiensi sumberdaya manusia dalam kegiatan penumbuhan kelompok yaitu aparat desa (lurah) , pelaku utama/usaha perikanan, dan penyuluh

G. Analisis Program /faktor keberhasilan

Dari sisi program, keberhasilan ini juga ditopang oleh desain kegiatan yang selaras dengan arah Renstra BPPP Banyuwangi dan kebijakan KKP, yang

menargetkan penguatan kelembagaan masyarakat KP. Faktor keberhasilan lainnya mencakup:

1. Penyesuaian metode pembentukan kelompok dengan karakteristik lokal sehingga program lebih diterima oleh masyarakat sasaran.
2. Ketersediaan format baku dan SOP pembentukan kelompok, yang memudahkan proses administrasi dan legalisasi kelompok baru.
3. Ketersediaan insentif tidak langsung, seperti peluang menerima bantuan atau mengikuti pelatihan, yang mendorong masyarakat membentuk kelompok secara sukarela.
4. Pendampingan pasca-pembentukan, yang menunjukkan bahwa kelompok tidak hanya dibentuk untuk memenuhi target, tetapi juga diarahkan agar berkelanjutan dan produktif.
5. Melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka percepatan pembentukan kelompok.

Indikator Kinerja Utama 19

Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan kriteria sesuai dengan Permen KP No 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. Formula perhitungan untuk IKU ini yaitu Jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang mendapatkan pendampingan penyuluh kelautan dan perikanan.

Tabel 23. Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi

<i>Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi</i>								
Realisasi TW III			2025				Renstra KKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	Target TW III 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	22	40	120	-	44	90,90

A. Capaian Tahun 2025

Pada Triwulan III Tahun 2025, BPPP Banyuwangi berhasil memberikan pendampingan kepada 40 gabungan kelompok, koperasi, dan korporasi, melampaui target Triwulan III sebesar 22, sehingga capaian tercatat 120%. Kegiatan pendampingan ini meliputi pembinaan kelembagaan, pelatihan manajemen usaha, pendampingan akses permodalan, serta penguatan jejaring pemasaran bagi kelompok-kelompok usaha kelautan dan perikanan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator ini merupakan IKU baru yang mulai diimplementasikan pada tahun 2025, sehingga belum terdapat data pembandingan dari tahun-tahun sebelumnya (2022–2024).

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029 sebesar 44 gabungan kelompok/koperasi/korporasi, capaian tahun 2025 sebesar 40 kelompok telah mencapai 90,90% dari target tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi mampu menjalankan program pendampingan secara efektif, meskipun mengalami keterbatasan anggaran dan sumber daya penyuluh.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai sehingga perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP.

Tabel 24. Perbandingan realisasi Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	22	40	120
2	BPPP Bitung	17,00	20,00	117,65
3	BPPP Ambon	10	11	110
4	BPPP Medan	23	28	120

Pada Triwulan III Tahun 2025, Capaian BPPP Banyuwangi sebesar 120% menunjukkan kinerja pendampingan gabungan kelompok, koperasi, dan korporasi yang sangat baik, melampaui target Triwulan III Tahun 2025. Capaian ini sejajar dengan BPPP Medan (120%), lebih tinggi dibanding BPPP Bitung (117,65%) dan BPPP Ambon (110%).

E. Analisis Keberhasilan/Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam mencapai 120% target pendampingan kelembagaan ekonomi masyarakat KP pada Triwulan III 2025 tidak lepas dari beberapa faktor pendukung. Pertama, adanya pemanfaatan basis data kelembagaan eksisting, seperti koperasi nelayan, korporasi perikanan budidaya, dan gabungan kelompok usaha (Gapokkan), yang telah teridentifikasi dan siap didampingi. Kedua, ketersediaan penyuluh dan fasilitator yang memahami pendekatan kelembagaan dan bisnis, menjadi motor penggerak dalam mendorong lembaga tersebut menuju arah penguatan kapasitas manajemen dan usaha. Ketiga, dukungan lintas sektor, baik dari Dinas KP daerah, koperasi, maupun mitra usaha, mempercepat intervensi dalam bentuk pelatihan, fasilitasi legalitas, atau akses pemasaran. Keempat, adanya komitmen internal manajemen satker dalam menjadikan penguatan kelembagaan ekonomi sebagai program prioritas di awal tahun.

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Keberhasilan pembentukan 40 kelompok atau 120% capaian terhadap target triwulan menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi berhasil menjalankan program ini secara efektif. Faktor pendukung utamanya antara lain:

1. Ketersediaan basis data masyarakat sasaran yang telah dipetakan lebih awal, memudahkan proses identifikasi dan mobilisasi pembentukan kelompok.

2. Pendekatan partisipatif penyuluh yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam proses pembentukan, menciptakan rasa kepemilikan di tingkat akar rumput.
3. Adanya sinergi dengan program lain seperti pelatihan, bantuan sarana, dan fasilitasi pemasaran yang memperkuat minat masyarakat untuk membentuk kelompok formal.
4. Komitmen manajemen dan dukungan lintas sektor, seperti Dinas KP daerah dan lembaga pendukung usaha, yang mempercepat proses legalisasi dan pengorganisasian kelompok.

G. Analisis Program /faktor keberhasilan

Secara umum, keberhasilan capaian program di Triwulan III Tahun 2025 pada BPPP Banyuwangi tidak lepas dari perencanaan kegiatan yang terarah serta pelaksanaan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan. Beberapa faktor penunjang keberhasilan meliputi:

- (1) pemanfaatan aset yang optimal untuk mendukung layanan;
- (2) Koordinasi yang baik dengan UPT lain, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait sehingga mendorong efektivitas pelaksanaan kegiatan; dan
- (3) melakukan komitmen manajemen untuk mencapai target kinerja melalui monitoring dan evaluasi yang rutin.

Sasaran Program 5

Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sasaran program Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan bagian dari kebijakan strategis dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang bertumpu pada penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat. IKU ini baru terbentuk di triwulan II dan terdiri dari 1 IKU yaitu Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di Satker BPPP Banyuwangi (Paket).

Indikator Kinerja Utama 20
Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di
Satker BPPP Banyuwangi (Paket)

Indikator ini mengukur jumlah media penyuluhan yang disusun dan disebarluaskan oleh Satker BPPP Banyuwangi dalam bentuk paket yang disesuaikan dengan kebutuhan aktual pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Media ini bisa berupa Leaflet / brosur, buku saku penyuluhan, infografis cetak maupun digital, video tutorial penyuluhan, modul interaktif atau presentasi digital, media audio (podcast, radio penyuluhan). IKU ini baru terbentuk pada triwulan II dan merupakan IKU baru. IKU ini juga baru akan dilakukan pengukuran pada triwulan IV tahun 2025.

Sasaran Program 6

Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 1 IKU yaitu Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi (orang).

Indikator Kinerja Utama 21

Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di
BPPP Banyuwangi

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan presentase jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang mengikuti dan lulus pelatihan teknis dalam 2 tahun terakhir dan mendapatkan sertifikat pelatihan teknis kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku. Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan merupakan jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025. Pada triwulan ini tidak ada target capaian untuk IKU ini karena baru akan dilakukan pengukuran pada triwulan IV tahun 2025. Metode perhitungan capaian IKU ini yaitu:

$$\text{Formula: } \frac{\text{Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan perikanan yang lulus pelatihan teknis}}{\text{Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025}} \times 100\%$$

3.3 Pengarus Utamaan Gender (PUG)

Berdasarkan hasil rekapitulasi data dari Indikator Kinerja yang dapat

dibedakan menurut jenis kelamin, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Tabel di bawah ini menyajikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPP Banyuwangi tahun 2025, yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Analisis data ini bertujuan untuk melihat tingkat partisipasi, keterlibatan, dan representasi perempuan dalam berbagai kegiatan pelatihan, pembentukan kelompok, dan kelembagaan di sektor kelautan dan perikanan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG), yang menekankan pentingnya kesetaraan akses, kesempatan, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan.

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPP Banyuwangi Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	IKU	Keterangan	L	P	Total
1	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)	-	998	712	1.710
2	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi	Jumlah pengurus dan anggota	29.105	4.774	33.879
3	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	Jumlah pengurus dan anggota	3.299	907	4.206
4	Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)	Jenis Kelamin Ketua Gapokkan/ Koperasi/ Korporasi	40	-	40
		Jenis kelamin Anggota gapokkan	1.649	202	1.851

Sumber: data primer diolah (2025)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa:

1. Masyarakat yang Dilatih

Dari total 1.710 peserta, 998 orang (58%) adalah laki-laki dan 712 orang (42%) perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat secara signifikan, tetapi masih lebih rendah dibanding laki-laki. Kesenjangan ini perlu diperhatikan untuk memastikan akses pelatihan yang setara, misalnya dengan

menyesuaikan waktu pelatihan atau menyediakan fasilitator perempuan.

2. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh

Dari total 33.879 peserta dalam kegiatan penyuluhan, hanya 4.774 orang (14%) perempuan, sementara 29.105 orang (86%) laki-laki. Perbedaan ini menunjukkan adanya keterbatasan akses perempuan terhadap kegiatan pendampingan, kemungkinan disebabkan oleh faktor sosial, budaya, atau tanggung jawab domestik.

3. Kelompok yang Dibentuk

Dari total 4.206 anggota kelompok, hanya 907 orang (22%) perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kelembagaan masih rendah, sehingga perlu strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi perempuan, misalnya mendorong pembentukan kelompok perempuan atau memberikan dukungan kepemimpinan.

4. Kepemimpinan Gapokkan/Koperasi/Korporasi

Seluruh 40 ketua kelompok adalah laki-laki, menandakan perempuan belum memperoleh ruang kepemimpinan di tingkat pengambilan keputusan. Sementara itu, dari total 1.851 anggota, terdapat 202 perempuan (11%), menunjukkan peluang untuk memperkuat peran perempuan melalui pelatihan kapasitas dan pemberdayaan anggota.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi partisipasi dan kepemimpinan di hampir semua indikator IKU, meskipun partisipasi perempuan meningkat dalam pelatihan dan kelembagaan. Untuk memperkuat PUG, diperlukan langkah strategis berupa penyediaan pelatihan yang ramah gender, dukungan fasilitator perempuan, dan mendorong kepemimpinan perempuan dalam kelompok maupun koperasi, sehingga program BPPP Banyuwangi menjadi lebih inklusif dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat kelautan dan perikanan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

Berdasarkan rekapitulasi SAKTI Tahun 2024 pada tanggal 30 September 2025, pagu anggaran BPPP Banyuwangi sebesar Rp. **96.488.074.000,00** dan realisasi sebesar Rp. **73.263.128.466,00** dengan persentase capaian 75,86%. Adapun realisasi per sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 26. Realisasi Anggaran per kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi
1	Kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan	5.837.734.00	4.500.093.194
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Banyuwangi	90.650.340.00	68.763.035.272
Total Anggaran BPPP Banyuwangi		96.488.074.000	73.263.128.466

Secara umum anggaran BPPP Banyuwangi dapat dimanfaatkan secara optimal dan kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan tercapai dengan baik.

3.5 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPP Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing cost*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian alokasi sumber dana publik



yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA.

BAB IV. PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja Utama

BPPP Banyuwangi pada triwulan III Tahun 2025 memiliki tanggung jawab 6 Sasaran Strategis dan 21 Indikator Kinerja Utama, dengan 7 IK berstatus biru, dan 1 IK berstatus hijau.

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*keyperformance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Logical Framework dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Banyuwangi di tingkat korporat Tahun 2024 sebesar **117,20%**.

Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan III Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
I. Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan					
1	Laporan Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village / SFV) BP3 Banyuwangi yang menerapkan IPTEK KP (laporan)	1	-	-	-
2	Jumlah Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Banyuwangi (Orang)	3,763	-	-	-
3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)	5,353	1.000	1.710	120
4	Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,78	0,12	0,19	120
5	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	120	-	-	-
II. Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan					

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
6	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)	1	-	-	-
7	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)	1	-	-	-
III. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	71,5	-	-	-
9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100	75	87,27	116,36
10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83	-	-	-
11	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	85	85	85	100
12	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	80	-	-	-
13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)	80	-	-	-
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)	80	80	100	120
15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPP Banyuwangi (Nilai)	92	-	-	-
IV. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
16	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi	5.996	4.000	5.000	120
17	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi	216	130	200	120
18	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung	791	267	350	120

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
	yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)				
19	Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)	44	22	40	120
V. Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan					
20	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di Satker BPPP Banyuwangi (Paket)	1	-	-	-
VI. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
21	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi	15	-	-	-

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja BPPP Banyuwangi cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian adalah masih adanya target pada PK sementara anggaran yang ada untuk kegiatan tersebut sudah diblokir ataupun dilakukan efisiensi anggaran. Hal ini menjadi ganjalan pada pencapaian target triwulan IV. Selain itu, dalam pengumpulan data dukung masih ada ditemukannya data yang duplikat dan data yang kurang lengkap yang tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan, maka hal yang harus dilakukan yaitu melakukan verifikasi data secara teratur dan teliti sehingga capaian sesuai dengan data dukung yang ada.



**BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
BANYUWANGI
2025**